

PELEMBAGAAN OPOSISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL: STUDI TENTANG OPOSISI PDIP DI DPR

Abstract

In a presidential system of government and opposition relations are not always mutually adversarial, unlike the relationship of government and opposition in countries that adopt a parliamentary system, in a presidential system of government and opposition relations can be negotiable. the mechanism of checks and balances, the opposition parties are able to negotiate, compromise, for the things that are important to the interests of the people. In such a reality, it is not easy to opposition political parties to encourage the process of institutionalization of the opposition in parliament, because the role of the opposition in parliament are not real. Increasing public appreciation theoretically form the capital for the further institutionalization of the opposition, as well as capital for PDIP to win the election. It seems to winning elections is not the case. The decline is one of them triggered by the actions of political elites who run transactional PDIP, which is very disappointing the public.

Key Words:

Democracy, institution, opposition

Tuswoyo

Ketua Prodi Ilmu Politik Universitas
17 Agustus 1945 Jakarta

A. Pendahuluan

Diskursus partai oposisi mulai mencuat kembali ke publik, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk menjadi partai oposisi yang ditindaklanjuti dengan tidak direkomendasikannya kader-kader PDIP duduk dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).¹

¹ Dalam Format Oposisi yang disusun PDIP dijelaskan bahwa dalam hal tidak ditempatkannya kader-kader PDIP di

Tetapi sebagai kekuatan penyeimbang di Parlemen, kekuatan oposisi muncul kembali sejak terjadinya penolakan pertanggung jawaban B.J Habibie, yang kemudian berlanjut dengan semakin kuatnya peran parlemen pasca reformasi.

Dalam sejarah perpolitikan nasional, dikenal adanya era di mana pemerintah terlalu lemah berhadapan dengan kekuatan oposisi yaitu pada demokrasi parlementer, atau sebaliknya pemerintah terlalu kuat berhadapan dengan oposisi, yaitu pada era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Terlalu lemahnya pemerintah berakibat pada jatuh bangunya kabinet, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak efektif. Dengan harapan agar seluruh proses politik dapat dipertanggungjawabkan ke publik, dan tidak lagi mengalami goncangan-goncangan yang dapat mengganggu jalannya administrasi pemerintahan, maka partai-partai politik besar menuntut untuk segera diselenggarakannya pemilu. Pemilu 1955 yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dengan dukungan suara mayoritas di parlemen, telah gagal melahirkan partai mayoritas yang dapat menguasai parlemen. Pada akhirnya secara keseluruhansistem parlementer dengan multi partainya telah melahirkan kabinet-kabinet koalisi,

pemerintahan, tidak termasuk dalam jabatan Duta Besar, karena Duta Besar bukan jabatan struktural pemerintah/ eksekutif atau jabatan mewakili pemerintah/eksekutif, melainkan jabatan mewakili negara di luar negeri. Juga jabatan pada Badan Usaha Milik Negara karena jabatan tersebut bukan jabatan politik melainkan jabatan yang bersifat kapasitas profesional perorangan, lihat *Format Oposisi PDI Perjuangan 2005-2009*, dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, 19 Mei 2005.

karena tidak ada partai yang memenangkan suara mayoritas.

Rupanya koalisi yang terbangun di atas landasan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda sangat rentan terhadap berbagai kepentingan elite partai yang tergabung dalam koalisi tersebut. Pada akhirnya lemahnya koalisi ini, membuka jalan bagi kekuatan oposisi untuk menjatuhkan pemerintah. Oleh karena itu, fenomena jatuh bangunnya kabinet yang berakibat pada tidak efektifnya pemerintahan, ditengarai terkait dengan keberadaan sistem multi partai, sistem pemilu proporsional, serta orientasi elite partai yang cenderung mementingkan kekuasaan. Sebagai akibatnya, ide tentang oposisi terlembagakan disalahkan atas semakin menajamnya ketegangan sosial.²

Pada era berikutnya, demokrasi dipimpin dengan lembaga kepresidenan yang kuat, semakin mengambil bentuk yang otoriter. Sejak itulah kekuatan oposisi mulai melemah, dan melemahnya gerakan oposisi ditengarai terkait dengan peningkatan peran negara. Peningkatan peran negara berhubungan erat dengan konsep revolusi yang dicanangkan Presiden Sukarno, yang menempatkan presiden sebagai sentral kekuasaan baik secara personal maupun kelembagaan. Dalam kenyataan demikian, elemen kontrol yang menjadi fungsi dasar dari oposisi menjadi sangat lemah ketika harus berhadapan dengan Sukarno dan pendukung-pendukungnya.

Pergantian kekuasaan dari Sukarno ke Suharto tidak secara

² Lihat, Anders Uhlin, *Oposisi Berserak : Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Jakarta : PustakaMizan, 1998), hal.39.

otomatis mengubah rezim. Kebijakan otoriter yang dipraktekkan Suharto juga terkait dengan konsep pembangunannya, yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Sebagai akibatnya, kekuatan oposisi baik yang ada di parlemen maupun di luar parlemen diperlemah.

Namun demikian seiring dengan perbaikan kesejahteraan ekonomi, kekuatan oposisi muncul sebagai kekuatan politik yang tersebar di luar parlemen dan eksis sebagai kelompok penekan.³ Dalam pandangan David E.Apter, fenomena tersebut sangat terkait dengan keberadaan pemerintah yang sangat hegemonik dan represif sebagaimana dalam pemerintahan partai massa tunggal, di mana oposisi politik tidak lenyap tetapi hanya berubah, tersembunyi dan bergerak di bawah tanah.⁴

Perubahan politik pada akhir 1990an yang ditandai oleh peningkatan partisipasi masyarakat dan menguatnya peranan kelas menengah,⁵ merupakan momentum bagi semakin terbukanya ruang gerak kelompok oposisi, karena pemerintah mulai lebih akomodatif terhadap kelompok kritis yang selama ini diposisikan sebagai

dissident.⁶ Reformasi politik menjadi momen berikutnya bagi kekuatan oposisi untuk memantapkan posisinya sebagai pengontrol kekuasaan. Dalam mengimbangi semakin menguatnya oposisi, sejak Presiden Abdurrahman Wahid sampai Susilo Bambang Yudhoyono, dibentuk kabinet koalisi besar dengan melibatkan beberapa partai pendukung dengan harapan posisi pemerintah akan lebih kuat ketika berhadapan dengan partai-partai politik di DPR.

Suatu keanehan terjadi, ketika Presiden Wahid yang memperoleh dukungan kekuatan mayoritas di parlemen harus mengakhiri jabatannya karena tekanan partai-partai pendukung pemerintah yang melancarkan gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan ini dilakukan kelompok Poros Tengah yang semula mengusung Wahid sebagai Presiden.⁷

Fenomena pelengseran Wahid oleh kelompok Poros Tengah merupakan pelajaran berharga bagi Megawati. Disamping harus memperkuat kabinet dengan mewadahi seluruh kekuatan partai

⁶Suatu fenomena yang menarik perhatian publik ketika pentolan Petisi 50 diundang BJ Habibie untuk mengunjungi PT PAL. Lihat, A. Makmur Makka (peny.), *Koridor Menuju Demokrasi : B.J.Habibie, Petisi 50 dan Partisipasi Politik Masyarakat*, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO, 1996).

⁷ Dalam pandangan Liddle, sumber perselisihan yang serius antara presiden versus pemimpin DPR dan MPR, terkait dengan karakter UUD 1945 yang membingungkan, sebuah model setengah presidensial dan setengah parlementer. Pada akhirnya kemenduaan inilah yang menjadi sumber perselisihan. Lihat, R.William Liddle, "Pengantar : Mengukir Demokrasi Indonesia", dalam Juan J.Linz, Alfred Stepan, Andrew Reynolds, Donald L.Horowitz, Richard Gunther, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat : Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, (Bandung : Mizan, 2001), hal 15.

³Kelompok penekan melancarkan "tekanan-tekanan " atas kekuasaan yang sedang berjalan, Lihat, Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok Penekan*, (Jakarta : Bina Aksara, 1981), hal.119.

⁴Lihat, David E.Apter, *Politik Modernisasi* (Jakarta :Gramedia, 1987), hal.211.

⁵Salah satu ciri kelas menengah adalah memiliki kemandirian politik dan tidak begitu terikat lagi pada pilihan-pilihan tradisional dalam menentukan partai yang akan didukung. Lihat, Amir Santoso, "Pemilu 1992 : Suatu Dinamika Perubahan Sosial", dalam *Pemilihan Umum 1992, Suatu Evaluasi*, penyunting M.Sudibyo (Jakarta : CSIC, 1992,) hal. 43.

besar,⁸ dan hanya menyisakan Partai Keadilan (PK) yang memiliki 7 kursi di DPR, juga berusaha menjaga hubungan baik dengan partai politik mitra koalisi di DPR. Langkah-langkah yang ditempuh Megawati, rupanya cukup efektif untuk menjaga kekuasaannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden. Kalau kebijakan membentuk kabinet “pelangi” dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkuat kabinet berhadapan dengan partai politik di DPR, maka tidak ditariknya Partai Keadilan (PK) dalam koalisi dapat dilihat sebagai upaya Megawati untuk memelihara oposisi di parlemen. Dalam konteks dibiarkannya PK menjadi oposisi di DPR, mengindikasikan bahwa Megawati juga menyakini perlunya oposisi di parlemen meskipun dalam batas-batas yang tidak memungkinkan mengganggu jalannya pemerintahan. Dalam prakteknya, selama Pemerintahan Megawati terdapat 3 (tiga) usulan interpelasi dari partai-partai politik, dan 1 (satu) usulan angket yang tentunya melibatkan partai oposisi di dalamnya.

Barangkali keputusan menjadi partai oposisi merupakan amalgamasi antara pandangan politik Megawati dan rasa sakit hatinya terhadap pencalonan SBY. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran oposisi di parlemen dapat mendinamisasikan aktivitas DPR dalam menjalankan peran kontrolnya terhadap pemerintah. Arti penting kehadiran oposisi di parlemen, juga terkait dengan penataan

⁸Megawati juga menarik dukungan dari PKB dengan mengangkat menteri dari PKB, Abdoel Djilil yang tidak disetujui Gus Dur.

kelembagaan politik, karena melalui pemilu dan peranan partai oposisi di parlemen, perubahan dapat berlangsung secara bertahap dan bersumber dari kesepakatan bersama antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Dalam kondisi yang demikian, upaya pemecahan konflik dapat dilakukan dalam batas undang-undang, prosedur, dan institusi tertentu yang ditetapkan melalui proses yang demokratis.⁹ Pada akhirnya rezim tersebut akan semakin dapat memformulasikan respon-respon kebijakan terhadap masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat, karena para politisi lebih mungkin mau bekerjasama satu sama lain dan oposisi akan berperilaku dengan cara yang lebih loyal dan bertanggung jawab.¹⁰

Pertanyaannya adalah apakah dalam menjalankan peran oposisinya di DPR, PDIP dapat memberi kontribusi bagi pelebagaan oposisi yang merupakan bagian bagi penataan pelebagaan politik sesuai dengan amanat reformasi ?

A. PELEMBAGAAN OPOSISI : TINJAUAN TEORITIS

Sebagaimana dikutip Samuel P. Huntington dari Talcott Parson bahwa pelebagaan merupakan proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil.¹¹ Sementara itu, pengertian kelembagaan mencakup dua hal yaitu ; kelembagaan sebagai norma-

⁹*Ibid*, hal 41.

¹⁰ Larry Diamond, *Developing toward Consolidation*, terjemahan (Yogyakarta : IRE Press, 2003), hal. 97.

¹¹Samuel P.Huntington, “Political Order in Changing Societies” dalam Sahat Simamora dan Suratin (terj.), *Tertib Politik : Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hal 16.

norma atau konvensi dan kelembagaan sebagai aturan main. Kelembagaan sebagai norma dan konvensi lebih dimaknai sebagai pengaturan berdasarkan konsensus atau pola perilaku dan norma yang disepakati bersama. Norma maupun konvensi umumnya bersifat informal. Kalau norma terkait dengan nilai-nilai yang dianut suatu kelompok, kalau konvensi lebih merupakan kebiasaan yang disepakati dalam komunitas tertentu.

Kelembagaan sebagai aturan main mengacu pada aturan yang telah disepakati bersama, yang kemudian mengikat bagi pendukung aturan main tersebut. Dalam hal ini Bogason (2000) mengemukakan beberapa ciri umum lembaga antara lain ; (1) adanya sebuah struktur yang didasarkan pada interaksi para aktor, (2) adanya pemahaman bersama tentang nilai-nilai, (3) adanya tekanan untuk berperilaku sesuai dengan yang telah disepakati/ditetapkan.¹² Sebagai contoh di Inggris, karena sudah sejak tahun 1937 telah diangkat seorang pemimpin oposisi (*Leader of the Opposition*) yang digaji secara khusus untuk memimpin kabinet bayangan (*shadow cabinet*) dalam *Her Majesty's Loyal Opposition* (Oposisi Loyal kepada Sri Baginda Ratu),¹³ maka pola hubungan antar aktor akan terbina dalam pola hubungan yang saling mengisi antara pemimpin pemerintahan (*Her Majesty's*

Government) yang dipimpin Perdana Menteri dengan partai oposisi (*Her Majesty's Loyal Opposition*) yang dipimpin seorang pemimpin oposisi (*Leader of the Opposition*).

Garis batas peranan oposisi menjadi relatif jelas dalam hubungannya dengan keberadaan negara. Artinya dengan disepakatinya norma dan nilai oposisi yang ada, maka perilaku para aktor akan mengikuti norma dan nilai yang telah disepakati. Inggris merupakan negara yang menganut *unwritten constitutions*. Dengan sistem parlementer pembagian peran memang cukup jelas, di mana partai pemenang akan memegang kekuasaan dan partai oposisi akan menjalankan kontrol melalui lembaga parlemen. Partai oposisi dan pemerintah dapat saling berhadapan (*adversarial*), dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Bagaimanapun juga, keberadaan partai oposisi di perlemen sangat terkait dengan model demokrasi yang dianut. Dalam model mayoritarian seperti Inggris, partai oposisi akan menjalankan perannya langsung berhadapan (*adversarial*) dengan pemerintah, karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bercirikan eksklusif, kompetitif, *adversarial*, sebagaimana di beberapa negara-negara yang menganut sitem pemerintahan parlementer dengan sistem dwipartai. Berbeda dengan di negara-negara yang menganut model demokrasi konsensus, pemegang kekuasaan bercirikan inklusif, tawar menawar (*bargaining*), dan kompromis,¹⁴ sehingga akan sulit untuk

¹² Peter Bogason, "Public Policy and Local Governance : Institutions in Postmodern Society" dalam Deliarnov, *Ekonomi Politik : Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, (Jakarta : Erlangga, 2006). hal 108.

¹³ Lihat, Allen Potter, Allen Potter, "Great Britain : Opposition with a Capital "O", dalam Robert A.Dahl (ed.), *Political Oppositions in Western Democracies*, (New Haven and London, Yale University Press, hal 15.

¹⁴Arend Lijphart, *Pattern of Democracy*, Yale University Press, New Haven and London, 1999, hal 2.

mengidentifikasi peran partai oposisi yang dianggap menentukan kebijakan pemerintah, sebagaimana yang terjadi pada peran partai oposisi di Amerika Serikat.¹⁵

Itulah sebabnya kemudian ketika Hans -Dieter Klingemann melakukan penelitian di sepuluh negara Eropa termasuk Inggris, menemukan bahwa mayoritas partai politik di sepuluh negara Eropa yang ia teliti, telah memenuhi janji politiknya dalam produk-produk kebijakan publik.¹⁶ Di Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya, partai-partai politik berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program-programnya. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari telah mapannya kelembagaan politik yang ada, sehingga partai pemerintah dan oposisi dapat berkompetisi secara bebas dan sehat untuk memuaskan konstituen melalui program-programnya.

Berbeda dengan di Amerika Serikat, meskipun dalam kasus-kasus tertentu Partai Republik dan Partai Demokrat dapat saling berhadapan, tetapi upaya kompromi di Senat maupun *House of Representative* tetap dapat dilakukan, karena ada peluang untuk menegosiasikan berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah. Itulah sebabnya

¹⁵ Robert A. Dahl, "Preface", dalam Robert A. Dahl (ed.), *Political Oppositions In Western Democracies*, (New Haven and London, Yale University Press, 1968), hal xix.

¹⁶ Hans-Dieter Klingemann, Richard I. Hofferbert, Ian Budge, "Parties, Policies, and Democracy", dalam Sigit Jatmiko, (terj.), *Partai Politik, Kebijakan, dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), juga lihat, Fadillah Putra, *Partai Politik dan kebijakan Publik : Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003* (Jakarta : Averroes Press, 2003) hal 73.

oleh Kaiser sistem di Amerika Serikat sebagai "*genotiation democracy*".¹⁷

Dengan demikian, pelembagaan oposisi di negara yang menganut model majoritarian-meminjam istilah Lipjhart, dengan sistem dwipartai akan membelah relasi presiden-DPR dalam pola hubungan yang saling berhadapan. Di mana partai pemerintah akan berjuang untuk mengimplementasikan program-program yang dikampanyekan dalam pemilu, partai oposisi akan mengkritisi kebijakan pemerintah sesuai dengan ideologi yang dijadikan platform partainya. Sebaliknya, di negara yang menganut model konsensus atau campuran seperti Amerika Serikat dan Indonesia, terbuka peluang untuk mengkompromikan berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah.

Forum-forum yang mempertemukan partai oposisi dan pemerintah, di parlemen akan dijadikan ajang untuk menjalankan peran kritis dan komprominya partai-partai. Bergantung pada model demokrasi yang dianut. Ketika model majoritarian akan lebih mengedepankan kritik, dalam model konsensus terdapat peluang untuk kompromi. Di mana media massa sebagai penghubung elite-massa, dapat menjadi sarana untuk mengkomunikasikan kebijakan yang diperdebatkan di forum-forum tersebut. Forum-forum tersebut, sering kali dijadikan sarana untuk mempengaruhi pandangan publik di tempat lain, bukan semata-mata untuk mempengaruhi/menggagalkan

¹⁷ Arend Lijphart, *Pattern of Democracy*, Yale University Press, New Haven and London, 1999, hal 2.

kebijakan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan Robert A. Dahl, perdebatan di parlemen bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk mempengaruhi partai-partai politik di parlemen, tetapi lebih banyak untuk mempengaruhi publik. Mempengaruhi pendapat umum amatlah penting, karena keberhasilan dalam usaha itu menciptakan modal yang seringkali dapat diubah menjadi pengaruh pada lokasi-lokasi yang lain.¹⁸

Kembali pada pelebagaan politik, secara sempit sering dipahami sebagai "pengaturan formal untuk berkumpulnya individu berikut pengaturan perilaku mereka, melalui penggunaan aturan dan proses keputusan yang ditekankan/ditetapkan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang disepakati sebagai pemilik kekuasaan."¹⁹ Pemahaman demikian akan mengantarkan pada suatu kekeliruan, seolah-olah hanya pengaturan formal yang masuk dalam pelebagaan politik, padahal perilaku politik yang tidak tertulis yang membentuk sikap dan perilaku seseorang seringkali juga turut menentukan proses pelebagaan tersebut. Sebaliknya kalau pelebagaan politik didefinisikan secara luas dalam arti mencakup pembentukan sikap, norma, prinsip, melalui internalisasi individu, maka pendefinisan yang demikian dapat terpeleket dalam pemahaman yang tidak berbeda dengan "budaya" atau

"norma sosial". Untuk membedakan lembaga politik dengan pemahaman tentang "budaya" (*culture*), atau "norma sosial" (*social norm*), Bo Rothstein, menggantikan kata "pengaturan formal" (*formal arrangement*) dengan istilah yang sering digunakan dalam studi administrasi publik, sebagai "*standard operating prosedur*".²⁰ Dengan istilah tersebut, dapat dihindari terjadinya berbagai kesalahan, -seolah-olah pelebagaan politik hanya mencakup aspek perilaku yang diatur secara formal, karena *standard operating prosedur*, mencakup prosedur formal maupun informal. Juga dari kecenderungan untuk memasukkan atau bahkan tidak bisa membedakan makna lembaga politik dari budaya dan norma sosial, karena *standard operating prosedur* bukan tata nilai budaya atau norma sosial. Meskipun demikian, pelebagaan politik adalah sangat mendasar bagi penciptaan budaya politik demokrasi dan peningkatan legitimasi sistem demokrasi.²¹ Bagaimana masyarakat menerima nilai maupun norma yang melekat pada sistem demokrasi akan menentukan perkembangan demokrasi di negara tersebut. Ketika sistem demokrasi mensyaratkan keberadaan oposisi, maka pelebagaan dapat dimaknai sebagai penerimaan atas nilai dan norma oposisi. Dalam sejarah perpolitikan nasional Indonesia, penerimaan masyarakat terhadap nilai dan norma oposisi berjalan terbata-bata. Lamanya kekuasaan otoriter berkuasa di negeri ini, juga kegagalan percobaan demokrasi liberal, telah menjadi penyebab bagi proses pelebagaan oposisi yang dimaksud. Pro-kontra terhadap

¹⁸ Rober A. Dahl " "Berbagai Pola Oposisi", dalam Miriam Budiardjo (peny.) *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal 133.

¹⁹Lihat, Bo Rothstein, " Political Institutions : An Overview " in Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann. Eds., *A. New Handbook of Political Science* (Oxford : Oxford University Press), hal 145.

²⁰Ibid, hal 145-146.

²¹ Lihat, Larry Diamond, *op.cit*, hal 95.

wacana oposisi yang digulirkan PDIP pada 2004, menjadi bukti bahwa proses penerimaan masyarakat terhadap nilai dan norma beroposisi berjalan terbata-bata.

Dalam konteks pembangunan politik, pelembagaan politik dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan diferensiasi dari sistem politik. "Kapasitas dari suatu sistem politik berkaitan dengan out-outputnya dan sejauh mana sistem politik itu dapat mempengaruhi masyarakat dan perekonomian."²² Sementara itu, diferensiasi dilihat dari spesialisasinya lembaga dalam hubungannya dengan fungsi sehingga dapat menjalankan perannya secara lebih optimal. Secara khusus, James S. Coleman menjelaskan agar sistem politik memiliki kapasitas kualitatif yang baru dan lebih baik, pembangunan politik harus dimanifestasikan dengan ; "(1) institusionalisasi pola-pola baru dalam integrasi pengaturan dan penanganan tekanan dan konflik yang bersumber dari meningkatnya diferensiasi, serta (2) terbentuknya pola-pola baru partisipasi dan distribusi sumber yang cukup tanggap terhadap tuntutan pemerataan."²³ Dari sinilah oposisi berperan untuk mengakomodasi dan melakukan tuntutan yang penting bagi pemerataan.

Pelembagaan oposisi merupakan bagian dari pelembagaan politik pada umumnya, itulah

²² Lihat, Lucian Pye, "Aspects of Political Development", pada Jan-Erik Lane and Svante Ersson, "Comparative Political Economy", dalam Haris Munandar (terj.) *Ekonomi Politik Komparatif : Demokrasi dan Pertumbuhan : Benarkah Kontradiktif*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002). 139-140.

²³Ibid, hal 140.

sebabnya ketika menjelaskan konsolidasi demokrasi Larry Diamond menyatakan; ..."sangat penting bukan hanya untuk membentuk pemerintahan tetapi juga membangun oposisi yang efektif".²⁴ Berangkat dari kenyataan tersebut, maka dalam hubungannya dengan penerimaan masyarakat terhadap nilai dan norma yang melekat pada sistem demokrasi, tidak hanya berhenti pada penerimaan atas keberadaan pemerintah yang dipilih secara demokratis, tetapi juga harus menerima kehadiran oposisi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi. Mengingat salah satu poin penting yang disampaikan Robert A. Dahl ketika menjelaskan tentang beberapa prasyarat untuk demokrasi adalah adanya sumber-sumber informasi alternatif, yang tentunya berasal dari oposisi.²⁵

Dalam konteks yang lebih luas Diamond menjelaskan, ketika kekuasaan digenggam sepenuhnya atau sebagian besar oleh eksekutif, dan ketika partai politik, anggota dewan, eksekutif dan sistem pengadilan dilanda wabah korupsi. Di negeri seperti ini, demokrasi - jika dapat kita sebut begitu - tidak akan dihargai secara luas dan terkonsolidasi, kecuali jika kita dapat membuatnya menjadi liberal, transparan dan terlembaga.²⁶

Sementara itu, Samuel P. Huntington dalam *Political Order in Changing Society*, sebagaimana dikutip Larry Diamond, menjelaskan tentang tujuan dari pelembagaan politik, yang tidak lain untuk

²⁴ Lihat, Larry Diamond, *op.cit* hal 118.

²⁵ Robert A. Dahl, *Polyarchy : Participation and Opposition*, New Haven and London, Yale University Press, 1971, hal 3.

²⁶Larry Diamond dalam: *Estudio/Working Paper 1997/101*, Juni 1997, hal 121.

memperkuat struktur demokrasi perwakilan dan pemerintahan formal, sehingga mereka menjadi lebih koheren, kompleks, otonom, dan mudah beradaptasi, dan karenanya lebih berkemampuan tinggi, efektif, berharga, dan mengikat.²⁷ Pelembagaan politik sebagai upaya pematangan demokrasi harus bermuara pada penguatan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dan oposisi sebagai penyeimbang dan pengontrol kekuasaan (*check and balances*). Baik pemerintah sebagai pelaksana maupun oposisi sama-sama memiliki legitimasi politik untuk menjalankan perannya masing-masing.

Secara historis lembaga politik terbentuk sebagai hasil interaksi dan akibat konflik yang terjadi antara berbagai kekuatan sosial, maupun karena perkembangan tahap demi tahap berbagai prosedur dan sarana yang diperlukan untuk mengatasi konflik tersebut.²⁸ Interaksi dan kecenderungan konflik akan meningkat seiring dengan semakin kompleksnya hubungan sosial. Dalam kenyataan yang demikian, pembentukan lembaga politik merupakan suatu tuntutan kebutuhan, karena semakin kompleks semakin besar tuntutan untuk membentuk lembaga politik yang lebih mantap dengan tujuan mempertahankan kelangsungan hidup komunitas.²⁹ "Walaupun

lembaga politik itu sendiri sebagian terbentuk oleh perpecahan dan konflik yang terjadi di suatu negara, tetapi bila susunan politik terlembaga maka susunan tersebut akan memperoleh kekuatannya sendiri."³⁰

Dalam kaitannya dengan kriteria untuk mengukur tingkat pelembagaan politik, Samuel P. Huntington mengemukakan parameter tentang kemampuan menyesuaikan diri dari lembaga politik tersebut, yang dapat diukur dari perhitungan kronologis, usia generasi, dan fungsi.³¹ *Pertama*, dalam kaitannya dengan perhitungan kronologis; semakin tua eksistensi suatu organisasi semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya. *Kedua* usia generasi, semakin sering organisasi mampu mengatasi masalah suksesi menurut tata cara yang luwes, dan kemudian menggantikan tokoh-tokoh pimpinannya, akan semakin tinggi pula tingkat pelembagaan organisasi itu. *Ketiga*, kemampuan menyesuaikan diri diukur dari fungsi. Tolok ukur yang tepat untuk mengkaji tingginya tingkat perkembangan organisasi bukanlah dari sudut sejauh mana organisasi dapat melaksanakan fungsi tertentu, melainkan justru sampai di mana ia dapat menyesuaikan dengan perubahan fungsi.

Sebuah contoh konkrit terkait dengan penjelasan pelembagaan oposisi adalah hasil penelusuran yang dilakukan Robert H. Dix di negara-negara Amerika Latin. Dalam hal ini Dix menjelaskan :

"One indicator of increasing institutionalization of

²⁷Ibid, 95. Larry Diamond dalam: *Estudio/Working Paper 1997/101*, Juni 1997, hal 121.

²⁸ Samuel P. Huntington, "Political Order in Changing Societies", *op.cit.*, hal 14.

²⁹Plutarch, "The Lives of the Noble Grecians and Romans," dalam Samuel P. Huntington, "Political Order in Changing Societies," dalam Sahat Simamora dan Suratin (terj.), *Tertib Politik : Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hal 15.

³⁰Robert A. Dahl, "Dilemmas of Pluralist Democracy", dalam Drs. Sahat Simamora, (terj.), *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*, (Jakarta : CV Rajawali, 1985), 103

³¹Ibid, hal 18-19.

oppositions was the mounting frequency with which the opposition won,...elections for the all-important presidency. That the oppositions of fails to win power within any given period may, of course, be a consequence of popularity of the government party, not of any legal or other disabilities under which the opposition Yet, at least in the America Latin context, electoral victories are in fact a rough indicator of degree of institutionalization of opposition role.”³²

(Satu indikator meningkatkan pelebagaan oposisi-oposisi adalah frekuensi yang dapat dimenangkan oposisi, ...dari pemilihan-pemilihan kepresidenan yang penting. Bahwa kegagalan-kegagalan oposisi-oposisi untuk memenangkan kuasasaan di dalam setiap periode yang telah terjadi, tentu saja, merupakan suatu konsekuensi dari ketenaran partai pemerintah, tidak terkait dengan masalah legalitas atau cacat-cacat lain yang ada pada partai oposisi... Namun, sedikitnya di dalam konteks Amerika Latin, kemenangan-kemenangan pemilihan merupakan suatu indikator yang keras dari derajat pelebagaan peran oposisi).

Dix melihat aspek penerimaan masyarakat terhadap keberadaan oposisi, -sebagaimana dapat dilihat dari keberhasilan oposisi

³² Robert H.Dix, “Latin America : Opposition and Development”, dalam Robert A. Dahl (ed.) *Regime and Oppositions*, hal 267.

memenangkan pemilu, akan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pelebagaan peran oposisi. Artinya bagaimana partai oposisi dapat menjalankan perannya, sehingga meningkatkan apresiasi publik terhadap partai oposisi, pada akhirnya akan besar pengaruhnya terhadap pelebagaan partai oposisi.

Dalam konteks yang berbeda, Alexander Irwan, seorang sosiolog dalam karyanya *Dalil Kelebagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya*, menjelaskan :

“Dalam hal kelembagaan, diskursus beroperasi pada dua tataran. Tataran pertama adalah operasi diskursus pada tingkat kelembagaan untuk mensosialisasikan sebuah gagasan. Kelebagaan tingkat pertama ini identik dengan organisasi, misalnya bagaimana sebuah kelompok menguasai dan memanfaatkan sebuah Fakultas Ekonomi, atau sebuah lembaga penelitian, dan media massa untuk mensosialisasikan gagasannya. Sedangkan kelembagaan tingkat kedua tidak berbentuk organisasi tetapi berupa regulasi negara atau lintas negara yang mempunyai kekuatan hukum untuk memberi sanksi bagi yang melanggar. Kelebagaan kedua inilah yang disebut oleh Soesastro (baca : Hadi Soesastro) sebagai norma, prinsip, aturan serta lembaga-lembaga yang menetapkan rambu-rambu dan menjaga agar rambu-rambu itu tidak dilanggar. Sebuah diskursus yang hanya beroperasi pada

kelembagaan tingkat pertama tentu saja lebih lemah dari diskursus yang mampu beroperasi di kelembagaan tingkat kedua.”³³

Penjelasan Alexander Irwan tersebut tampaknya menekankan aspek fungsional dari lembaga, dalam arti kemampuan lembaga menjalankan fungsi yaitu sejauhmana sebuah lembaga menjalankan fungsi bukan sampai di mana ia dapat menyesuaikan dengan perubahan fungsi.

Kalau mengikuti logika test pergantian rezimnya Samuel Huntington, akan nampak bahwa kemenangan oposisi menjadi cukup relevan untuk menjelaskan pelembagaan oposisi. Tetapi dalam jangka pendek keberhasilan partai oposisi juga dapat dilihat dari perubahan kebijakan pemerintah setelah memperoleh kritik atau kontrol dari kekuatan oposisi. Sebagaimana diketahui bahwa oposisi juga berperan dalam mengungkap ketidakadilan (*injustice*), dan kalau kemudian ketidakadilan tersebut dapat diketahui masyarakat maka dapat dikatakan oposisi berhasil menjalankan fungsi sosialisasi politiknya.

Dengan penjelasan tersebut di atas, kita dapat memperoleh gambaran tentang apa itu lembaga politik, pelembagaan politik, bagaimana pelembagaan politik berlangsung, serta bagaimana mengukur tingkat pelembagaan

politik. Dengan demikian konsep pelembagaan politik ini dapat diaplikasikan dalam menjelaskan tentang apakah PDIP dalam menjalankan peran oposisinya telah sampai pada tingkat pelembagaan kedua atau baru sampai pada pelembagaan pada tingkat pertama, atau sedang menuju pada proses pelembagaan pada pada tingkat kedua.

B. EVALUASI TERHADAP PELEMBAGAAN OPOSISI PDIP

Pelembagaan oposisi yang telah berlangsung selama percobaan demokrasi parlementer, berakhir ketika percobaan tersebut berakhir. Secara khusus Andres Uhlin menyatakan, “demokrasi (parlementer-pen), dan terutama ide tentang oposisi terlembagakan, disalahkan atas semakin menajamnya ketegangan sosial.”³⁴ Setelah Presiden Soekarno memegang kekuasaan, melalui dekrit presiden 5 Juli 1959 percobaan untuk menegakkan demokrasi melalui pembentukan Liga Oposisi harus berakhir bersamaan dengan upaya presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR). Pada era berikutnya, sampai dengan berakhirnya pemerintahan Orde baru, gagasan tentang perlunya partai oposisi di DPR belum banyak diperhatikan, meskipun praktik beroposisi terus berlangsung. Beroposisinya partai politik dan kekuatan-kekuatan sosial lain, lebih terkait dengan upaya marginalisasi politik oleh pemerintah.

Wacana partai oposisi muncul kembali ketika Megawati mendeklarasikan diri menjadi Partai Oposisi pada Kabibet SBY-JK, yaitu

³³Alexander Irwan, “Dalil Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya”, dalam Vedi R.Hadiz dan Daniel Dhakidae, (ed.), *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*, (Jakarta : Pt Equinox Publishing Indonesia, 2006), hal 32.

³⁴ Andres Uhlin, *Oposisi Berserak : Arus deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Mizan, 1998), hal. 39.

setelah gagal dalam pemilihan Presiden langsung dan pemilihan anggota legislatif tahun 2004. Sebagai tindak lanjut, Megawati dan jajaran pimpinan PDIP berusaha melakukan langkah-langkah yang cukup serius mulai dari pengiriman beberapa anggota fraksi PDIP ke Jerman untuk belajar menjadi partai oposisi, sampai dengan penyusunan format oposisi.

Format oposisi yang disusun oleh DPP PDIP tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato Ulang Tahun PDIP ke-33, 11 Januari 2006 yang antara lain dinyatakan :

“PDI Perjuangan ingin mengawal pemerintah agar melahirkan kebijakan yang pro rakyat serta mendesak pemerintah memenuhi janji-janji yang disampaikan kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 lalu. Inilah yang disebut sebagai oposisi. Dalam tugas pengawalannya itu, PDIP tidak apriori terhadap kebijakan pemerintah serta tidak asal berbeda pendapat saja. Oleh karena itu pemerintah tidak perlu khawatir sebab sikap oposisi PDIP adalah loyal kepada ideologi Pancasila dan UUD 1945.³⁵

Meskipun Megawati dan elite-elite PDIP telah berulang kali menegaskan sikap dan kebijakannya sebagai partai oposisi, serta melakukan berbagai persiapan untuk menjadi partai oposisi sedemikian rupa, bahkan dalam berbagai kesempatan telah menjalankan peran oposisinya dengan melakukan kritik-kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, rupanya tidak begitu mudah bagi PDIP

untuk dapat diterima kehadirannya sebagai partai oposisi. Padahal penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kehadiran oposisi merupakan prasyarat bagi proses pelembagaan oposisi di DPR lebih lanjut. Alasannya bermacam-macam, oposisi dianggap tidak memiliki akar historis di Indonesia, oposisi dianggap hanya lazim di sebuah negara dengan sistem parlementer. Oposisi di parlemen dipandang rentan untuk dikooptasi oleh penguasa dan lebih mudah terjebak kartelisasi. Ada juga yang mengkaitkan dengan perbedaan ideologi yang harus ada antara partai oposisi dan partai pemerintah, atau dikatakan sebagai “justifikasi ideologi” partai oposisi yang dapat dibedakan dari ideologi pemerintah.

Sebenarnya akar sejarah oposisi di Indonesia cukup jelas, yang oleh beberapa ilmuwan Indonesia diidentifikasi dengan munculnya tindakan “pepe”, yang kemudian berkembang menjadi gerakan perlawanan oleh partai-partai politik pada era sebelum kemerdekaan, sampai dengan era pasca reformasi. Meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut, tetapi bagi PDI Perjuangan, yang lahir dari fusi politik tahun 1973 dengan nama PDI, beroposisi bukan merupakan pengalaman baru. PDI sejak kelahirannya senantiasa diposisikan sebagai “partai marginal” oleh pemerintahan Orde Baru, sehingga dalam banyak kasus selalu bersikap layaknya sebuah partai oposisi. Tentunya ini menjadi sangat berbeda dengan Partai Golkar yang tidak pernah memiliki pengalaman sebagai partai oposisi.

Namun demikian, terhadap alasan bahwa partai oposisi harus memiliki “justifikasi ideologi” yang dapat dibedakan dengan ideologi partai pemerintah memang menjadi

³⁵Sinar Harapan, 12 Januari 2006.

persoalan, karena dalam kenyataannya pada saat Megawati berkuasa menjalankan kebijakan yang relatif tidak berbeda dengan yang dijalankan pemerintahan SBY-JK, yaitu cenderung berorientasi liberal.³⁶ Dalam kenyataan yang demikian, persoalan justifikasi ideologi yang membedakan antara partai oposisi dan pendukung koalisi pemerintah menjadi tanda tanya besar, apalagi koalisi pendukung pemerintahan SBY-JK bukan koalisi berdasarkan kesamaan program partai (*policy blind coalitions*).³⁷ Sementara itu, program partai merupakan turunan dari ideologi atau azas yang dianut partai politik.

Sebagai jawaban atas persoalan justifikasi ideologis yang menjadi tanda tanya tersebut, PDIP menetapkan ideologi nasionalis kerakyatan sebagai dasar kebijakan beroposisinya. Penegasan atas orientasi ideologis yang dijadikan dasar bagi beroposisinya PDIP, ditetapkan pada Kongres ke II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tanggal 28 Maret sampai dengan 1 April 2005 di Bali. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa dalam beroposisi, PDIP kembali pada

nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Pada kongres tersebut, dilakukan juga perumusan kembali ideologi partai yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar Partai sebagai azas partai, yaitu Pancasila 1 Juni 1945 sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Fakta ini mempertegas reorientasi posisi ideologi PDIP ke arah ideologi nasionalis kerakyatan, karena penekanan pada Pancasila 1 Juni 1945 merupakan penegasan atas pelaksanaan pemikiran Soekarno yang berorientasi nasionalis kerakyatan, seperti yang pernah dilakukan Surjadi Ketua PDI ketika mengatasi persoalan disorientasi ideologi PDI yang berdampak pada ditinggalkannya konstituen pada pertengahan 1980. Artinya terdapat suatu kenyataan bahwa ketika PDIP memegang kekuasaan, meskipun tidak diakui telah terjadi pergeseran orientasi kebijakan ekonomi politik dari ekonomi kerakyatan yang menekankan pada pentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian ke kebijakan ekonomi politik yang meminimalisir peran negara dalam mengendalikan pasar.

Dengan orientasi barunya, PDIP dapat menjalankan peran oposisinya sesuai dengan tuntutan masyarakat yaitu adanya justifikasi ideologi yang dapat dibedakan dengan SBY-JK yang selama ini dikenal sebagai berorientasi neo-liberal. Meskipun penempatan pemerintahan SBY-JK sebagai pemerintahan yang berorientasi neoliberal tersebut senantiasa dibantah, para elite PDIP tetap menganggap pemerintah SBY-JK lebih berorientasi liberal dari pada kerakyatan. Terkait dengan orientasi neoliberal tersebut, salah seorang kader PDIP Aria Bima secara terbuka menyatakan : ...“munculnya SKB Tiga Menteri dalam Penetapan UMR

³⁶ Kajian perbandingan tentang kebijakan pemerintahan Mega-Hamzah dengan SBY-JK secara komprehensif, lihat, Fahrudin Fitria, <http://incouverfra.blogspot.com/search/label/neoliberalisme>.

³⁷Lihat, Michael Wahman, *Policy Blind Coalition : the Case of Kenya*, Lund University Sweden, dalam michael wahman@svet.lu.se. Dalam teori koalisi partai politik, secara garis besar ada dua kelompok, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan (*policy blind coalitions*) dan koalisi yang didasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy-based coalitions*). Lihat, Lili Romli “Membangun Koalisi Partai Politik”, Pusat Penelitian Politik LIPI, 18 Sep 2007, dalam www.oup.co.uk/general/vsi/.

6 % adalah bukti bahwa rezim Yudhoyono-Kalla sangat neo-liberal.”³⁸Kalau mengacu pada penjelasan teoritik seperti adanya dominasi sektor finansial atas sektor riil dalam tata ekonomi politik,³⁹ atau kebijakan yang menekankan pada privatisasi, utang luar negeri, pencabutan subsidi, dan liberalisasi ekonomi,⁴⁰ sepertinya anggapan PDIP tersebut tidak terlalu salah.

Berdasarkan analisis Fahrudin Fitriya, kabinet SBY-JK jauh lebih liberal dari pada pemerintahan Megawati, salah satu indikator yang paling mudah dilihat adalah dalam hubungannya dengan program privatisasi. Hanya dalam waktu setahun SBY-JK berkuasa terdapat 44 BUMN dilego. Privatisasi kali ini disertai penjualan seluruh saham 14 BUMN industri, 12 BUMN kepada investor strategis, dan beberapa BUMN lainnya kepada asing.⁴¹Dalam catatan Kid Wahyudin, “Pemerintah

³⁸Penyataan Aria Bima terkait dengan kebijakan SKB Tiga Menteri dalam Penetapan UMR 6 %, *Suara Merdeka*, 4 Nopember 2008.

³⁹ Harry B Priyono, “Marginalisasi ala Neoliberal”, *Majalah Basis*, Mei-Juni 2004, hal.18.

⁴⁰Penjelasan tersebut didasarkan pada pemikiran Vincent Navarro, tentang pokok-pokok kebijakan neoliberalisme sebagai berikut; (i) deregulasi pasar tenaga kerja, melalui penerapan sistim kontrak dan outsourcing, (ii) deregulasi pasar financial, (iii) deregulasi perdangan barang dan jasa, (iv) mengurangi subsidi dan jaminan sosial untuk public, (v) privatisasi dan penjualan asset strategis, (vi) mempromosikan individualisme dan konsumerisme, (vii) pengembangan teori dan narasi yang memuji-muji keunggulan pasar, (viii) mempromosikan anti-intervensionisme.Lihat, Fahrudin Fitriya “[Garis Perbedaan Kebijakan Ekonomi Era Megawati dan SBY](http://inouvetra.blogspot.com/search/label/neoliberalisme)”<http://inouvetra.blogspot.com/search/label/neoliberalisme>.

⁴¹Ibid.

telah memprivatisasi 12 BUMN pada periode 1991-2001 dan 10 BUMN pada periode 2001-2006.Pemerintah, pada tahun 2008, melalui Komite Privatisasi BUMN yang diketuai Menko Ekuin Boediono saat itu, mengharapkan agar dari 139 BUMN diprivatisasi menjadi 69 BUMN.⁴² Dalam hubungannya dengan berbagai kecenderungan tersebut, Prof. Dr. Mubyarto menyatakan ; “Terus terang kita bertanya-tanya kemana sebenarnya arah keberpihakan pemerintah ini....Pemerintah (SBY-JK, -pen) sangat tidak suka kalau dikatakan liberal. Tetapi, sepertinya negara yang paling liberal dan membuka seluruh pasarnya adalah Indonesia.”⁴³

Beberapa indikator lain yang sering digunakan publik maupun elite PDIP dalam menilai orientasi kebijakan pemerintah yang neoliberal tersebut, adalah masuknya beberapa teknokrat yang selama ini dikenal sebagai pendukung kebijakan ekonomi politik liberal ke dalam kabinet SBY-JK. Beberapa orang teknokrat tersebut adalah Boediono menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, juga Menteri Perdagangan Mari LK Pangestu.⁴⁴

⁴²Kid Wahyudin, dalam “[Pemerintah Mengabaikan Rakyat, Memanjakan PejabatPengendalian BBM Bersubsidi: Merugikan Rakyat](http://k.idwahyudin.wordpress.com/2011/01/20/)”, lihat, <http://k.idwahyudin.wordpress.com/2011/01/20/>.

⁴³Mubyarto “Subsidi” dalam *BBM antara Hajt Hidup dan Lahan Korupsi*, (Jakarta : buku Kompas, 2005), hal.138.

⁴⁴Terdapat juga Anggito menjadi Staf Khusus Boediono saat menjadi Menkeu jaman Megawati. M Iksan menjadi Staf Khusus Boediono saat menjabat menko perekonomian. Sedangkan, Chatib sebagai Staf Khusus Menkeu Sri Mulyani, Lihat, Sabtu, 24 Oktober 2009, www.tribun-timur.com.

Dengan orientasi barunya, PDIP berupaya mempersoalkan berbagai kebijakan pemerintah SBY-JK yang dianggap bertentangan dengan ideologi nasionalis-kerakyatan. Tidak kurang dari 22 kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan orientasi ideologi PDIP, -mulai dari Penandatanganan Perjanjian RI - GAM di Helsinki sampai dengan sikap pemerintah terhadap Malaysia- yang kemudian menuai kritik dari partai oposisi PDIP.⁴⁵ Dalam isu kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, blok Cepu, import beras, beberapa partai seperti PAN, PKB, PPP, mendukung digunakan hak-hak DPR untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah meskipun secara terbatas, tidak sampai pada hak menyatakan pendapat. Partai-partai tersebut berkepentingan untuk mendukung isu tersebut, karena kebijakan tersebut sangat bersentuhan dengan kepentingan rakyat (populis). Suatu perlawanan partai oposisi PDIP yang sangat menonjol dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah, adalah isu tentang Blok Cepu dan Isu Kenaikan Harga BBM.

Partai oposisi berupaya keras melawan kebijakan pemerintah yang menetapkan *ExxonMobil* sebagai *lead operator* Blok Cepu. Bagi partai oposisi PDIP, kebijakan pemerintah tersebut dianggap bertentangan dengan orientasi baru PDIP yang nasionalis. PDIP lebih memilih untuk mendukung Pertamina, karena dalam pandangan PDIP Pertamina merupakan representasi perusahaan nasional yang memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi Blok Cepu dan perlu didukung untuk menjadi

perusahaan berskala dunia. Sebagai tindak lanjut terhadap perlawanan tersebut, PDIP berupaya menggalang kekuatan politik di DPR untuk mempersoalkan kebijakan pemerintah tentang Blok Cepu. Hasilnya, PDIP gagal membawa persoalan Blok Cepu ke dalam penggunaan hak angket Blok Cepu.

Kegagalan PDIP membawa persoalan Blok Cepu tersebut, ditengarai disebabkan oleh beredarnya "uang panas" di DPR, sehingga beberapa partai yang dulunya mendukung hak angket Cepu menjadi berubah menolaknya. Meskipun demikian, dari keseluruhan proses politik yang dilakukan terdapat beberapa keberhasilan yang dapat dicapai partai oposisi. Pertama, PDIP dapat memperlihatkan keteguhan sikapnya dalam membela Pertamina yang nota bene perusahaan nasional, sebaliknya dapat mempersoalkan kebijakan pemerintah yang nyata-nyata mendukung perusahaan asing. Dalam hal ini, PDIP dapat membuktikan ke publik tentang konsistensi partai oposisi yang telah mengambil kebijakan reposisi, sekaligus menjelaskan ke publik tentang orientasi neoliberal dari pemerintah SBY-JK yang selama ini diingkarinya.

Dengan mempersoalkan kebijakan pemerintah tentang blok Cepu dan berbagai kebijakan lain yang dianggap bertentangan dengan ideologi "barunya" PDIP dapat membuktikan bahwa PDIP benar-benar telah berubah. Dalam arti, tidak lagi berorientasi liberal sebagaimana ketika PDIP berkuasa. Upaya PDIP mempersoalkan Blok Cepu tersebut, memang tidak dapat dilihat dari sisi keberhasilan PDIP melawan kebijakan pemerintah semata, karena perdebatan di DPR

⁴⁵Lihat, Laporan Kegiatan Fraksi PDIP DPR RI, 2004-2009, dalam e-Mail : info@fpdiperjuangan.or.id.

dan forum-forum publik lainnya seringkali tidak semata-mata ditujukan untuk mempengaruhi partai-partai di DPR, tetapi untuk mempengaruhi publik di wilayah lain. Secara khusus Robert A. Dahl menjelaskan bahwa perdebatan di parlemen bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk mempengaruhi partai-partai politik di parlemen, tetapi lebih banyak untuk mempengaruhi publik. Mempengaruhi pendapat umum amatlah penting, karena keberhasilan dalam usaha itu menciptakan modal yang seringkali dapat diubah menjadi pengaruh pada lokasi-lokasi yang lain.⁴⁶

Kedua, dalam hubungannya dengan pencarian dukungan publik tersebut, bersama-sama kader partai lain PDIP melakukan "road show" ke berbagai perguruan tinggi yang ternyata juga memperoleh sambutan positif. Demonstrasi mahasiswa yang menuntut agar pemerintah membatalkan keputusan tentang penetapan ExxonMobil sebagai *lead operator* Blok Cepu, dan kemudian mengalihkan ke Pertamina, dapat dilihat sebagai keberhasilan dari *road show* tersebut. Meskipun kemudian beberapa kader partai lain tersebut ada yang menyebrang dan menolak hak angket blok Cepu, tetapi *road show* dan demonstrasi mahasiswa tersebut dapat dilihat sebagai bentuk keberhasilan kader-kader PDIP dalam memperoleh dukungan publik.

Perihal dukungan publik tersebut memang sangat penting dalam proses pelembagaan oposisi, apalagi ketika dukungan publik tersebut kemudian berujung pada

dukungan konstituen pada pemilu. Sebagaimana dijelaskan Robert H. Dix, bahwa salah satu indikator peningkatan pelembagaan oposisi adalah kemenangan partai oposisi pada pemilu. Nampaknya, PDIP yang telah memperoleh dukungan publik di berbagai wilayah termasuk para mahasiswa, tidak serta merta meningkatkan dukungan dari warga sekitar Blok Cepu. Banyak diantara anggota masyarakat baik secara perorangan maupun yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) justru sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut, terutama yang berada di sekitar wilayah Blok Cepu. Bahkan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Siswono Yudohusodo memuji kesepakatan Blok Cepu sebagai keberhasilan pemerintah dalam kerjasama dengan pihak asing. Sebagaimana dia katakan : "Belum pernah ada kerja sama yang sebaik ini," katanya. Mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini menilai kerja sama itu menguntungkan negara.⁴⁷

Beberapa LSM yang kemudian mendukung *ExxonMobil* menganggap eksploitasi yang dilakukan *ExxonMobil* sebagai peluang untuk mensejahterakan masyarakat. Pengalaman mereka berhubungan dengan Pertamina dan *ExxonMobil* selama beroperasi di Blok Cepu, telah membawa pengaruh besar terhadap sikap mereka dalam mendukung calon operator Blok Cepu. Pilihan warga sekitar sumur minyak Banyuurip beranggapan bahwa *ExxonMobil* telah terbukti peduli

⁴⁶ Rober A. Dahl " "Berbagai Pola Oposisi", dalam Miriam Budiardjo (peny.) *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal.133.

⁴⁷Lihat, "Suara-suara Bernada Nasionalistis", *Majalah Tempo*, Edisi 2 April 2006.

dengan persoalan warga. Misalnya dalam soal pendidikan dan kesehatan masyarakat, secara lebih luas program *community development* memperoleh perhatian seksama dari Exxon, sebaliknya Pertamina sama sekali tidak pernah melakukan hal yang sama.⁴⁸

Dalam hal dukungan warga terhadap ExxonMobil, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Banyuwirip-Jambaran (Formas Baja), Parmani dengan tegas menolak keinginan para elite politik di pusat tersebut dengan mengatakan: "Tolong jangan dikaitkan dengan nasionalisme. Warga di sini sangat menunggu proyek ini. Siapun operatornya asalkan bisa mensejahterakan dan tidak merugikan penduduk kita terima. Termasuk ExxonMobil sekalipun."⁴⁹

Sikap masyarakat yang mendukung pengelolaan sumur migas Blok Cepu yang dilakukan Mobil Cepu Limited (MCL) -anak perusahaan Exxon Mobil Oil Indonesia (EMOI)- bagi berbagai lapisan masyarakat di Blora, Jateng dan Bojonegoro, Jatim, dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari kemampuan pihak ExxonMobil dalam mendekati masyarakat yang pada saat itu sedang mengalami dampak langsung krisis ekonomi yang bekepanjangan sejak reformasi 1997. Berbagai pihak termasuk MCL, memperkirakan dengan adanya eksplorasi dan eksploitasi sumur migas Blok Cepu, diperkirakan akan

ada 10.000 tenaga kerja, yang terlibat baik di sektor perminyakan, maupun bidang lainnya.

Hal tersebut memunculkan keinginan masyarakat agar dapat terlibat langsung atau bekerja di seputar migas Blok Cepu. Pada saat ini keinginan ini terus bergulir dan tidak hanya dimonopoli warga di sekitar Kecamatan Ngasem dan Kalitidu, tetapi sudah meluas di seluruh wilayah Bojonegoro, juga Blora Jawa Tengah. Sebagaimana diliris beberapa media lokal menyebutkan bahwa pertumbuhan LSM di Bojonegoro dan Blora berkembang pesat yang semuanya berusaha untuk terlibat di seputar pengelolaan sumber migas Blok Cepu. Jumlah LSM mencapai 58, sementara jumlah pengusaha jasa konstruksi di Bojonegoro terus berkembang menjadi 500 kontraktor.⁵⁰ Fenomena ini menjelaskan *multiplayer effect* yang dapat dinikmati masyarakat sekitar Blok Cepu, yang juga menjadi pendorong kuat bagi penerimaan masyarakat terhadap eksploitasi yang dilakukan Mobil Cepu Limited di Blok Cepu.

Artinya kegagalan PDIP menjangkau masyarakat di wilayah sekitar Blok Cepu tidak semata-mata dapat dilihat sebagai kegagalan PDIP melakukan sosialisasi kebijakan oposisinya ke masyarakat di wilayah sekitar Blok Cepu, tetapi dapat dilihat sebagai bagian dari kegagalan perusahaan-perusahaan pemerintah mendekati masyarakat. Meskipun demikian, dampaknya cukup signifikan terhadap upaya PDIP memperoleh dukungan publik yang penting bagi proses pelebagaan oposisi lebih lanjut.

Dalam konteks pelebagaan oposisi, penolakan masyarakat di

⁴⁸Terdapat sembilan desa yang telah merasakan program *community development*, seperti Brabowan, Bonorejo, Mojodelik, Gayam, Begadon, Ringin Tunggal, Katur, Sumengko dan Beged, dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, beasiswa dan bantuan untuk keluarga miskin, Lihat, Budi Sugiharto, *LSM Banyuwirip Tolak Blok Cepu Dikaitkan Nasionalisme*, Kamis, 09/03/2006 10:29 WIB, dalam <http://m.detik.com>.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Harian Jawakini, 29 Juni 2006.

wilayah sekitar Blok Cepu terhadap kebijakan partai oposisi yang mendukung Pertamina memang tidak cukup signifikan mempengaruhi proses pelebagaan tersebut. Meskipun penolakan tersebut dapat berujung pada penurunan apresiasi PDIP di wilayah tersebut, karena penolakan tersebut tidak meluas menjadi gerakan nasional dan tidak dijadikan dasar bagi partai pemerintah di DPR untuk mematahkan perlawanan PDIP di DPR. Sebagaimana telah disampaikan, bahwa perubahan sikap politik dari para pendukung kebijakan oposisi dalam soal penggunaan hak angket Blok Cepu lebih dipengaruhi oleh politik transaksional.

Perlawanan partai oposisi berikutnya adalah terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang menurut pemerintah dianggap sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga BBM di tingkat dunia. Bagi PDIP yang telah mereposisi diri, menjadi partai kerakyatan kembali-kebijakan tersebut dianggap tidak *pro wong cilik*, tetapi lebih pro pasar. Sebagai partai yang berorientasi kerakyatan, sudah menjadi keharusan untuk membela kepentingan *wong cilik* yang terkena dampak paling buruk dari kenaikan harga BBM tersebut.

PDIP bersama-sama partai-partai lain di DPR, termasuk beberapa partai yang selama ini dikenal sebagai anggota koalisi pemerintah berhasil mempersoalkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini melalui penggunaan hak angket. Dalam pemanfaatan hak DPR, perlawanan partai oposisi kali ini nampak lebih maju selangkah. Meskipun kalau diukur dari target PDIP untuk menjadikan hak angket BBM sebagai pintu masuk melakukan

pemakzulan kepada Presiden yang dianggap melanggar konstitusi kurang berhasil. Kegagalan PDIP menjadikan angket BBM sebagai pintu masuk pemakzulan, lebih disebabkan oleh kepentingan partai-partai koalisi yang mendukung angket tersebut untuk mempertahankan keberlanjutan pemerintahan.

Beberapa partai pendukung angket dari pihak koalisi, seperti PKS, PAN, lebih berkepentingan untuk membongkar carut marut tata kelola Migas dari pada mendukung partai oposisi untuk memakzulkan presiden. Kalau dibandingkan dengan persoalan kenaikan BBM 2012, nampaknya kepentingan untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM lebih mengemuka dari pada kepentingan lain. Kepentingan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat yang kemudian ditangkap dan diperjuangkan partai politik di DPR, atau sebaliknya karena adanya tekanan yang begitu kuat dari masyarakat. Kalau pada kenaikan harga BBM 2008, tekanan terhadap pemerintah hanya datang dari partai politik di DPR, maka pada kebijakan kenaikan harga BBM 2012 ini tekanan datang dari kekuatan lain, yaitu dari kelompok buruh yang merasa sangat dirugikan dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut. Bagi buruh yang baru saja mengalami penyesuaian UMR, dan belum juga menikmati, kenaikan tersebut akan sia-sia kalau kemudian harga-harga kebutuhan pokok naik, karena kenaikan harga BBM. Partai-partai politik di DPR tidak ada pilihan lain, kecuali mendukung keinginan rakyat untuk menunda kenaikan harga BBM.

Kalau pada isu kenaikan harga BBM 2012 hubungan partai oposisi

dan serikat buruh relatif baik, tidak demikian dengan kondisi pada saat kebijakan kenaikan harga BBM 2008 dipersoalkan.

Dengan ditandatanganinya UU Perburuan oleh Menteri Tenaga Kerja Yacob Nuwa Wea yang didalamnya mengatur tentang kontrak kerja pendek dan *outsourcing*, telah membuat hubungan organisasi buruh dan Megawati sangat buruk. Berbagai aksi protes menentang sistem *outsourcing* merupakan salah satu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah dan sekaligus resistensi terhadap kapitalisme.⁵¹ Dalam perspektif buruh, *outsourcing* menjadi sebuah penghalang bagi upaya peningkatan kelayakan hidup.

Pada penolakan BBM tahun 2012 ini, bukan sekedar apresiasi publik yang meningkat tetapi partai oposisi dapat menggunakan oposisi di luar parlemen untuk meningkatkan tekanannya terhadap pemerintah, sehingga pemerintah harus membatalkan kebijakan tersebut, meskipun di paripurna partai-partai pendukung koalisi berhasil membuat keputusan yang memberi peluang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih leluasa, karena dikaitkan dengan peningkatan harga minyak dunia. Suatu kondisi yang cukup positif dilihat dari kepentingan partai oposisi, sebagaimana dikemukakan Hans Daalder, bahwa partai oposisi akan dapat meningkatkan posisi tawarnya di parlemen dengan bersinergi dengan kekuatan oposisi di luar parlemen.

Berbeda dengan penolakan partai oposisi pada kenaikan harga tahun 2008, dimana partai oposisi

tidak dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik di luar parlemen. Hal itu disebabkan karena hubungan buruh dan partai oposisi yang masih belum kondusif, karena kebijakan PDIP tentang *outsourcing* yang dikeluarkan menjelang berakhirnya pemerintahan Megawati, juga adanya fenomena lain berupa larangan dari DPP partai agar tidak membentuk organisasi massa apapun sejak tahun 2000, yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi partai untuk memperoleh dukungan publik yang penting dalam mendukung proses-proses politik di DPR.⁵² Sebaliknya mensosialisasikan kebijakan partai oposisi ke publik melalui sayap baru yang dibentuk menjelang pemilu 2009, -yang di dalamnya berasal dari tokoh-tokoh Islam liberal dari Universitas Paramadina Jakarta-belum dapat menjalankan perannya sebagai sayap partai yang diharapkan menarik konstituen dari kalangan Islam. Sebaliknya karena tokoh-tokoh Islam tersebut cenderung memiliki jarak pemikiran dengan Islam arus utama (*mainstreams*), maka sulit diharapkan untuk menarik konstituen dari kalangan Islam.

Meskipun PDIP tidak cukup berhasil mensinergikan peran oposisinya dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar parlemen, seperti kelompok buruh, tetapi berdasarkan survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang peta politik di Indonesia (Maret 2007) menunjukkan bahwa popularitas PDIP--yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai oposisi--cenderung meningkat dalam

⁵¹Celia Mather, *Menjinakkan Sang Kuda Troya, Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sistem Kontrak/Outsourcing*, (Jakarta :Trade Union Right Centre, 2008).

⁵² Mengenai pelarangan tersebut ditetapkan dalam Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 189/IN/DPP/X/2000 tertanggal 18 Oktober yang ditujukan kepada pengurus DPD dan DPC PDI Perjuangan serta media massa seluruh Indonesia, dikutip dari Noviantika Nasution, *Op.cit*, hal. 85.

dua tahun terakhir, bahkan berada pada posisi pertama (19,7 persen), menggeser posisi Partai Golkar (15 persen) dan Partai Demokrat (10 persen).¹ Kemudian meningkat ketika pada tahun 2008 partai oposisi PDIP mempersoalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Berdasarkan Survei Indo Barometer, kenaikan tersebut cukup signifikan karena pada Mei 2007 popularitas Megawati 22,7% (SBY 35,3%), Desember 2007 Mega 27,4% (SBY 38,1%), menjadi Mega 30,4% (SBY 20,7%) pada Juni 2008. Naiknya popularitas pimpinan partai oposisi Megawati merupakan dampak kebijakan kenaikan BBM pada 5 Juni 2008.⁵³

Dalam konteks pelembagaan oposisi, peningkatan apresiasi publik tersebut sangat mendukung bagi semakin diterimanya kehadiran oposisi di parlemen, yang berarti pula semakin positif bagi proses pelembagaan oposisi di DPR. Sayangnya, apresiasi publik tersebut kemudian tidak berujung pada peningkatan perolehan suara PDIP pada pemilu-pemilu setelah 1999. Kursi PDIP terus mengalami penurunan, kalau tahun 1999 memperoleh 151 kursi, pada tahun 2004 menurun menjadi 109 kursi dan tahun 2009 setelah PDIP menjadi partai oposisi menurun lagi menjadi 96 kursi.

Dapat diperkirakan bahwa penurunan tersebut terkait dengan salah satu alasan bahwa oposisi yang diperankan partai politik di DPR akan cenderung mudah terkooptasi dan memunculkan kekhawatiran berupa politik transaksional. Nampaknya, kekhawatiran masyarakat justru terbukti ketika beberapa elite partai oposisi PDIP terjerumus pada politik

transaksional dalam kasus penetapan Miranda Gultom sebagai Deputy Dewan Gubernur BI. Dari 26 anggota DPR periode 1999-2004 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus *travellers cheque* (TC) sebagai suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom pada 2004, terdapat beberapa tokoh partai oposisi seperti Panda Nababan, Agus Condro, Max Muin, dll.⁵⁴

Kalau penurunan pada 2004 disebabkan oleh tindakan partai yang tidak konsisten dengan ideologi nasionalisme karakyatannya, maka kegagalan PDIP pada 2009, dapat dilihat sebagai imbas dari tindakan beberapa elite PDIP di DPR yang memperlihatkan sikap ambivalen, karena di satu sisi berkoar-koar untuk memperjuangkan kepentingan rakyat (*wong cilik*) di sisi lain melakukan tindakan yang justru membenarkan kekhawatiran publik terhadap peran partai oposisi di DPR. Artinya oposisi PDIP di mata publik dianggap tidak konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bayang-bayang masa lalu, yang menghantui masyarakat belum dapat ditebus dengan peran oposisi PDIP yang berupaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur oposisi. Persoalan tersebut memang tidak semata-mata dapat dilihat sebagai kegagalan beroposisinya PDIP, karena dapat juga sebagai keberhasilan pemerintah dalam melancarkan strategi politik pencitraannya dan perlawanan baliknya, sehingga apapun yang dilakukan oposisi tidak berdampak pada citra pemerintah di mata publik. Misalnya saja dalam kasus Bantuan

⁵³FI@faridakhwan.net dalam [http://www.blogger.com/comment.g ?](http://www.blogger.com/comment.g?)

⁵⁴Lihat, "KPK Tetapkan 26 Tersangka Kasus Travellers Cheque", *Antara - Kamis*, 2 September 2010.

Langsung Tunai (BLT) yang oleh pemerintah dijadikan katup pengaman dalam menanggulangi dampak buruk dari kenaikan harga BBM terhadap orang miskin, dan oleh PDIP dianggap sebagai bentuk derma yang dapat melemahkan daya juang masyarakat, justru menjadi kartu truff bagi para juru kampanye. Para juru kampanye dapat mempengaruhi rakyat bawah yang mungkin simpati dengan PDIP, untuk kemudian meninggalkan PDIP karena apabila mendukung PDIP atau PDIP menang BLT akan dihapuskan.

Bagi penerima BLT, propokasi ini cukup merisaukan karena bagaimanapun juga mereka menganggap bahwa BLT telah benar-benar menjadi penyelamat bagi mereka yang dilanda krisis ekonomi. Mereka tidak lagi berrfikir bahwa kenaikan harga yang menjadikan mereka menderita adalah juga kebijakan pemerintah.

PENUTUP

Meskipun kebijakan beroposisinya PDIP tersebut dapat dilihat sebagai *break true* bila dikaitkan dengan sikap dan kebijakan politik Soekarno tentang oposisi, tetapi orientasi ideologis nasionalis kerakyatan yang menjadi dasar bagi kebijakan oposisinya PDIP sangat linier bila dikaitkan dengan sikap politik Soekarno yang selalu beroposisi terhadap neokolonialisme dan imperialismeserta memiliki komitmen yang tinggi terhadap sosialisme.⁵⁵

Dengan orientasi nasionalis kerakyatan tersebut bukan saja dapat memposisikan PDIP berhadap-

hadapan secara ideologis dengan pemerintah SBY-JK, tetapi dapat dengan mudah mengkritisi berbagai kebijakan yang memang nampak berorientasi neoliberal. Dengan demikian, secara teoritik PDIP telah menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat terkait dengan kebijakan oposisi yang dijalankan PDIP. Permasalahannya adalah mengapa kemudian, peran oposisi yang telah dilakukan PDIP di DPR tidak berpengaruh secara signifikan bagi peningkatan perolehan suara PDIP pada Pemilu 2008.

Kalau berkaca dari kemenangan partai oposisi di berbagai negara, persoalan utama yang selalu menjadi determinan adalah penurunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sangat menentukan. Meskipun partai oposisi memperoleh apresiasi positif dari masyarakat, tetapi kalau pemerintah mampu mempertahankan reputasi dan citranya di masyarakat, sulit bagi partai oposisi untuk mengalahkan partai pemerintah. Krisis ekonomi seringkali menjadi taruhan yang paling krusial bagi pemerintah, ketika pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi rakyat akan dengan mudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Pada akhirnya krisis ekonomi akan bergulir menjadi krisis legitimasi, dan pada saat itulah partai oposisi memperoleh kesempatan untuk menjadi partai alternatif ketika partai pemerintah tidak lagi memperoleh dukungan masyarakat. Kemenangan PDI pada Pemilu 1999, merupakan bukti bahwa partai alternatif muncul ketika pemerintah tidak lagi mampu mengatasi krisis moneter yang berujung pada krisis legitimasi.

Persoalan berikutnya adalah terkait dengan penjelasan Robert H. Dix, bahwa pelembagaan oposisi akan

⁵⁵Bradly R. Simpson, *Economic with Guns : Amerika Serikat, CIA dan Munculnya Pembangunan Otoriter Rezim Orde Baru*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2010), hal.208.

semakin menguat ketika partai oposisi mampu memenangkan pemilihan umum. Pernyataan tersebut tentu tidak salah, tetapi bukan berarti kalau partai oposisi tidak memenangkan pemilu pelembagaan oposisi akan terhenti. Kalau mengikuti perkembangan politik di Jepang, ternyata sejak tahun 1953 Partai Liberal Demokrat (LDP) terus menerus berkuasa, dan hanya pada tahun 1970an sempat tidak berkuasa karena pemilu dimenangkan oleh New LDP, dan setelah itu LDP menang lagi dan terus berkuasa sampai pada tahun 2010 yang lalu. Sejak tahun itu pula kemudian partai oposisi berkuasa menggantikan LDP. Lamanya berkuasa LDP atau lamanya partai lain menjadi oposisi, ternyata tidak mengurangi pelembagaan oposisi yang berlangsung di Jepang. Partai oposisi tetap mendapat tempat dan pada waktunya nanti kepercayaan politik masyarakat terhadap partai pemerintah mengalami penurunan yang signifikan pada saat itu pula partai oposisi menjadi partai alternatif. Pada tahun 2010, ketika Jepang dilanda krisis ekonomi berakibat pada penurunan dukungan rakyat terhadap pemerintah dan pada saat itu pula moment untuk tampilnya partai alternatif terbuka.

Artinya pelembagaan oposisi memang akan semakin menguat ketika partai oposisi menang, tetapi tidak berarti pelembagaan oposisi akan melambat/melemah ketika partai oposisi kalah. Pelembagaan oposisi akan melambat ketika apresiasi masyarakat terhadap peran oposisi menurun. Artinya partai oposisi harus mampu menjaga kepercayaan publik, sebagaimana juga partai yang berkuasa, sambil menunggu moment yang memungkinkan bagi tampilnya partai

oposisi menjadi partai alternatif. Biasanya persoalan kesabaran menunggu menjadi batu ujian yang tidak mudah untuk dilalui, karena pada saat yang sama godaan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah selalu datang. Pada saat yang sama berbagai kesulitan terkait dengan pendanaan partai menjadi faktor lain yang turut memperberat proses menunggu tersebut. Di negara-negara yang tidak menganut sistem parlementer, tidak ada kesempatan untuk membentuk *shadow cabinet* yang didanai operasionalnya melalui APBN, sebagai akibatnya kesanggupan untuk bertahan dalam sikap kritisnya menjadi persoalan lain yang menambah beban partai oposisi dalam sistem presidensial. Tidak terlalu salah kalau keretakan di tubuh PDIP antara yang bertahan dengan kebijakan menjadi partai oposisi dan yang mendaki diakhirinya kebijakan menjadi partai oposisi, terkait dengan kenyataan tersebut.

Daftar Pustaka

- Aspinall, Thomas Edward.2000. *Political Opposition and the Transition from Authoritarian Rule:The Case of Indonesia*,The Australian National University, AUN Press.
- Bima, Aria .2009. *Interupsi untuk Rakyat Aria Bima di DPR RI Senayan dalam Rekaman Media Massa*, Jogjakarta, Pustaka Dunia Buku.
- Budiardjo, Miriam (ed.).1975.*Demokrasi dan Pembangunan Politik, dan Masalah Negara*, Seri Bunga Rampai No.2, Fisip UI, Jakarta : PT.Gramedia.

- (peny.).1984. *Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi*, Jakarta : PT.Gramedia.
- (peny.).1991.*Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- (peny.).1998. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- ,2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (edisi revisi), Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Budiman, Arief dan Tornquis, Olle.2001. *Aktor Demokrasi : Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, Jakarta : ISAI.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Chaniago, A. Andrinof. 2001.*Gagalnya Pembangunan : Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*, Jakarta : LP3ES.
- Chilcote, H. Ronald.2003. *Teori Perbandingan Politik :Penelusuran Paradigma*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Crouch, Harold.1999. *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta ; Pustaka Sinar Harapan.
- Daalder, Hans .1968.*The Netherlands : Opposition in a Segmented Society*, New Haven and London, Yale University Press.
- Dahl, A Robert (ed.).1974. *Regimes and Oppositions*, Yale University Press, London.
- ,1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- (ed.).1965. *Political Opposition in Western Democracies*, New Haven and London, Yale University Press.
- Deliarnov.2002. *Ekonomi Politik : Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*, Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Dharmawan, HCB, de Rosari AL Soni BL (ed.).2005.*BBM : Antara Hajat Hidup dan lahan Korupsi*, Jakarta : Buku Kompas.
- Diamond, Larry and Platter F. Marrc (eds).1993.*The Global Resurgence of Democracy*, University of Pittsburgh Press,.
- Diamond, Larry.1999.*Developing Democracy toward Consolidation*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, dalam Tim IRE Jogjakarta (terj.)
- Dirdjosuparto, Sutamto.1998. *Sukarno Membangun Bangsa : Dalam Kemelut Perang Dingin Sampai Trikora*, Jakarta: Badan Kerjasama Yayasan Pembina dan Universitas 17 Agustus 1945 se-Indonesia, 1998.
- Dix, H. Robert .1974. "Latin America : Oppositions and Development", New Haven and London, Yale University Press.

- Dwipayana, G dan Ramandhan.K.H.1989.*Suharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*, Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang, Yayasan Asih Asah Asuh.
- Fatah, Saefulloh Eep.1999. *Membangun Oposisi : Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan*, Bandung : Rosda.
- Feith Herbert. 2007. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, New York : Cornell University Press.
- Fishman, C Ted. 2002. *China, Inc. :Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Gaffar, Afan.1992. *Javanese Voters A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford. 1983.*Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, PT Dunia Pustaka Jaya.
- Habibie, Jusuf Bacharuddin.2006. *Detik-Detik yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta : THC Mandiri.
- Hadi, Syamsul.2005. *PANCASILA BUNG KARNNO : Himpunan Pidato, Ceramah, Kursus dan Kuliah*, Jakarta : Paksi Bhineka Tunggal Ika.
- 2005. *Strategi Pembagunan Mahather dan Suharto :Politik Industrialisasi dan Modal jepang di Malaysia dan Indonesia*, Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Hadiz, R Vedi dan Dhakidae (ed.). 2006. *Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta : Pt Equinox Publishing Indonesia.
- Hairus, Salim HS (peny.).1999. *Tujuh Mesin Pendulang Suara : Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta :LKiS.
- Hamid, Zulkifli (terj.).1988.*Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Hamzah, Farchri. 2011. *Negara, Pasar dan Rakyat : Mencari Makna, Relevansi dan Tujuan*, Jakarta : Yayasan Faham Indonesia.
- Hardiman, F.Budi. 2009. *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam teori Diskursus Jurgen Habermas*, Jakarta, Yogyakarta, Kanisius.
- Harsutejo (terj.).2010. *Soeharto dan Barisan Jenderal Orde Baru : Rezim Militer Indonesia 1975-1983*, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Hervey, David. 2010. *Imperialisme Baru : Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*, Jakarta : Resist Book.